Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

E-mail: herli.antoni@unpak.ac.id

Abstract

Sexual violence against children in Indonesia is a very serious human rights violation with profound physical and psychological impacts. Although there are various laws and regulations such as the Child Protection Law and the Sexual Violence Crime Law, its implementation still faces many obstacles. The purpose of this study is to further analyze related to legal protection for victims of sexual violence and provide protection and a sense of justice for victims. This research method uses normative juridical research, by using a descriptive approach of analysis with this method, the author tries to reveal laws and regulations related to legal theories related to the object of research. The results of this study are able to provide a broad overview related to handling and providing a sense of justice for victims, as well as providing constructive ideas in handling both victims and perpetrators, the conclusion of this study is that from the provisions of the applicable laws and regulations it is felt that it is enough to provide a sense of justice for victims and also has a sustainable impact on the recovery of the victims themselves, so that laws and regulations are good enough to accommodate legal interests for the community. The suggestion from the results of this study is that it is hoped that law enforcement will be able to carry out the law well as the order of the law and law enforcement must have a strong sense of empathy related to the recovery of victims of sexual violence, especially children.

Keywords: Sexual Violence, , Children, Legal Protection.

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dengan dampak fisik dan psikologis yang mendalam meski dengan berbagai aturan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode tersebut penulis berusaha mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini mampu memberikan Gambaran secara luas berkaitan dengan penanganan dan memeberikan rasa adil bagi korban, serta meemberikan gagasan yang konstruktif dalam penanganan baik korban maupun pelaku kejahatan, simpulan dari penelitian ini yaitu dari ketentuan perundang undangan yang berlaku dirasa cukup memberikan rasa keadilan bagi korban dan juga memiliki impek berkelanjutan bagi pemulihan korban itu sendiri, sehingga peraturan perundang undangan sudah cukup baik mengakomodir kepentingan hukum bagi Masyarakat. Saran dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan penegak hukum mampu menjalankan undang-undang dengan baik sesuai perintah undang-undang dan penegak hukum harus memiliki rasa empati yang kuat terkait pemulihan korban kekerasan seksual khususnya anak.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, , Anak, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Doktrin negara hukum di dunia, terdapat dua tipe negara hukum yang lazim dikenal dalam pembelajaran Hukum Tata Negara, yakni Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep Rechtsstaat dan Negara Hukum Anglo-Saxon yang melahirkan konsep Rule of Law.¹ Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Angga Saputra, "Negara Hukum Indonesia," Jurnal Hukum 20, no. 1 (2022): 135-148.

Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara²

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini tidak hanya menghancurkan masa depan korban secara individual, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial secara lebih luas. Dalam konteks Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak,³ baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hukum. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun, implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus-kasus kekerasan seksual sering kali tidak dilaporkan atau bahkan tidak ditindaklanjuti dengan baik karena berbagai alasan, seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum, dan kendala birokrasi.⁴

Istilah kekerasan digunakan untuk dijadikan gambaran bagi perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. UU No. 23 tahun 2004, dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Sehingga untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuatlah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjamin keamanan dan keadilan bagi orang-orang yang berumah tangga. Salah satu fenomena kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dan memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius karena relasi antara suami dan isteri yang timpang masih terus menimbulkan korban dari kalangan perempuan dan anak-anak⁵

Masalah kekerasan dalam khususnya rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Serta patut dikategorikan kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun dengan demikian tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua

² Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila," *Osf.io*, no. August (2018): 1–20.

³ Agung Gumelar Agustin dkk. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Studi di Kuningan. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 15 Nomor 02.2024. 162-185

⁴ Agustini, Ika dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechtenstudent Journal*, No 2 Vol 3 (Agustus 2024): 343.

⁵ Alimuddin, *Penyelesaian sengketa PKDRT di Pengadilan Agama, Mandar Maju Cet Ke-1*. Bandung, 2014, hlm 46.

kekerasan dikatakan sebagai komponen kejahatan, misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi dan imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian.⁶

Salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Banyak orang tua atau wali yang merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami anak mereka karena khawatir akan stigma sosial yang mungkin mereka terima. Selain itu, korban anak sering kali merasa takut dan terintimidasi untuk melaporkan apa yang mereka alami karena ancaman dari pelaku atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, proses hukum yang berlarut-larut dan kurangnya pendampingan bagi korban juga menjadi kendala signifikan. Banyak korban yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena merasa frustrasi dan putus asa dengan sistem yang ada. Pendampingan yang kurang memadai dari pihak kepolisian, jaksa, dan pengadilan sering kali membuat korban merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Pada sisi lain, kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai di kalangan aparat penegak hukum tentang penanganan kasus kekerasan seksual anak turut menjadi faktor penghambat. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki kepekaan dan pengetahuan yang cukup untuk menangani korban anak dengan pendekatan yang tepat dan empatik. Hal ini sering kali berakibat pada proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak optimal, yang pada akhirnya merugikan korban.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak, termasuk mengesahkan berbagai undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait perlindungan anak, termasuk penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih spesifik mengatur tentang berbagai bentuk kekerasan seksual dan sanksinya. Namun, meskipun sudah ada payung hukum yang cukup kuat, implementasi di lapangan masih sering kali tidak optimal. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan memahami proses hukum yang berlaku. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat juga sangat penting dalam upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak. Organisasi non-pemerintah sering kali memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan edukasi, advokasi, dan layanan pendampingan bagi korban. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif dan efektif.⁷ Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak. Misalnya, pengembangan platform

⁶ Sarip Hidayat. Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 13 Nomor 02.2022. 181-191

⁷ Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013.

pelaporan online yang aman dan mudah diakses dapat membantu korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tanpa harus merasa takut atau malu. Teknologi juga dapat digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai hak-hak anak dan proses hukum yang berlaku, sehingga masyarakat lebih memahami dan terlibat aktif dalam upaya perlindungan anak. Pemberian perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual anak, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya dari segi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sisi implementasi dan dukungan sosial yang memadai. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dengan lebih baik dan korban mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat yang peduli terhadap masa depan generasi muda. Dengan bekerja bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa harus mengalami trauma yang mengerikan akibat kekerasan seksual.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode tersebut penulis berusaha mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan mengkaji berbagai sumber data yang ada, penelitian dapat mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam sistem pelaporan dan penanganan kasus, serta memahami hambatan yang dihadapi oleh korban dalam mencari keadilan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan intervensi yang lebih tepat guna dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Yang Diatur Oleh UU No. 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Dalam KUHP Baru?*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memberikan landasan hukum yang signifikan dalam melindungi korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak.⁹ Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa kedua regulasi ini mengatur aspek-aspek yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan yang komprehensif. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai poin-poin penting dari kedua peraturan tersebut.

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS menghadirkan beberapa inovasi yang signifikan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak. Poin-poin utamanya meliputi:

⁸ Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak di Dalam Keluarga*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

⁹ Alfiani, Vivi Riski. "UU TPKS vs KUHP: Perbedaan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 8, No. 2 (2022), 271-290.

1. Definisi yang Diperluas

UU TPKS menetapkan definisi yang lebih luas mengenai kekerasan seksual, mencakup 19 jenis tindak pidana seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan persetubuhan dengan anak. Definisi yang jelas ini penting untuk memastikan semua bentuk kekerasan seksual terhadap anak tercakup dalam perlindungan hukum yang ada.

2. Penambahan Kategori Pelaku

Salah satu aspek penting dari UU TPKS adalah penambahan kategori pelaku yang mencakup orang tua, wali, pengasuh anak, serta orang yang memiliki hubungan istimewa dengan anak. Hal ini memperluas kemungkinan untuk penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang sebelumnya mungkin terlindungi oleh hubungan mereka dengan korban.

3. Pemfokusan pada Korban

UU TPKS menekankan prioritas terhadap kepentingan terbaik bagi korban dengan mengatur hak-hak korban, seperti hak atas penanganan kasus dengan rahasia, perlindungan selama proses hukum, pemulihan fisik dan psikologis, serta hak atas restitusi yang adil.

4. Perlindungan Khusus untuk Anak

Anak-anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus, termasuk identitas yang dirahasiakan, pendampingan selama proses hukum, serta akses yang memadai terhadap layanan pemulihan fisik dan psikologis. Hal ini penting untuk menghindari stigmatisasi dan memfasilitasi pemulihan korban secara menyeluruh.

5. Pencegahan

Selain penegakan hukum, UU TPKS juga mengatur tentang upaya pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi, kampanye publik, dan pembentukan budaya yang menolak kekerasan seksual. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

KUHP Baru juga memberikan kontribusi signifikan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak dalam Pasal 80-89 KUHP Baru.¹⁰ Berikut adalah beberapa aspek utamanya:

1. Peningkatan Hukuman

KUHP Baru memperketat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan memperkenalkan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar. Peningkatan ini diharapkan dapat menjadi deterren bagi para pelaku kejahatan seksual.

2. Pengaturan Pemberatan Hukuman

KUHP Baru juga mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau melibatkan anak

¹⁰ S.H, Chrisman Reynold Silaen. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. 7 September 2023,

lain dalam tindakan kekerasan tersebut. Pejabat publik atau orang tua/wali anak yang menjadi pelaku juga diberikan penanganan hukum yang lebih tegas.

3. Restitusi

KUHP Baru mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab hukum, termasuk biaya pemulihan fisik dan psikis. Restitusi ini tidak hanya sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai pengakuan atas kerugian yang diderita korban.

c. Perbedaan Perlindungan antara UU TPKS dan KUHP Baru

Meskipun keduanya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual anak, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan ruang lingkup:

1. Fokus Utama

UU TPKS lebih berfokus pada perlindungan, pemulihan, dan hak-hak korban kekerasan seksual anak.¹¹ Sementara itu, KUHP Baru lebih menekankan pada penjeratan dan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual.

2. Ruang Lingkup

UU TPKS memiliki cakupan yang lebih luas dengan mencakup 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan KUHP Baru hanya mengatur beberapa jenis kejahatan seksual terhadap anak.

3. Pendekatan

UU TPKS menggunakan pendekatan yang lebih modern dan berpusat pada korban, sementara KUHP Baru cenderung mengikuti pendekatan hukum yang lebih tradisional dalam menangani kejahatan.

UU TPKS dan KUHP Baru adalah instrumen hukum yang penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual anak di Indonesia. Dengan menyediakan definisi yang jelas, penambahan kategori pelaku, pemfokusan pada korban, dan upaya pencegahan, UU TPKS berusaha memberikan perlindungan yang komprehensif. Di sisi lain, KUHP Baru memberikan pendekatan yang lebih tegas terhadap pelaku dengan hukuman yang lebih berat dan kewajiban restitusi kepada korban. Kedua regulasi ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan anak-anak dari ancaman kekerasan seksual, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual dihukum secara adil sesuai dengan tingkat kejahatannya.

2. ***Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Indonesia Mengenai Pentingnya Melaporkan Kekerasan Seksual Terhadap Anak***

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian mendalam. Tingkat kesadaran ini bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, serta norma budaya dan sosial. Meski pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO)

¹¹ Annisa, T., Fathul, L. N. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual". Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, Volume 11, Nomor 1, Mei, 2024.

telah berupaya meningkatkan kesadaran ini, tantangan yang dihadapi tetap besar.¹² Pertama, dari segi kesadaran masyarakat, banyak yang belum memahami betapa pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di beberapa daerah, yang berdampak pada kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual membuat banyak orang enggan melaporkan kasus tersebut. Dalam banyak komunitas, korban dan keluarganya seringkali merasa malu dan takut dihakimi oleh masyarakat sekitar jika mereka melaporkan kekerasan yang dialami.

Kedua, pemahaman tentang proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual juga masih rendah. Banyak orang tidak tahu harus melapor ke mana atau bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan seksual. Mereka seringkali bingung dengan prosedur hukum yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya informasi yang tersedia secara publik mengenai layanan-layanan yang bisa membantu korban, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga-lembaga lainnya yang fokus pada perlindungan anak. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam budaya yang patriarkal, seringkali perempuan dan anak-anak dianggap sebagai subordinat dan kekerasan seksual mungkin dianggap sebagai hal yang tidak perlu diungkapkan atau dilaporkan. Hal ini membuat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap dan tidak tertangani dengan baik.

Namun demikian, ada juga perkembangan positif yang patut dicatat. Kampanye-kampanye kesadaran publik yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai NGO telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak. Program-program pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada guru, orang tua, dan anak-anak telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan cara melaporkan kekerasan seksual. Selain itu, media massa dan media sosial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.¹³ Berbagai berita dan kampanye di media telah membantu menyebarkan informasi tentang kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya melaporkan kasus tersebut. Media sosial khususnya telah menjadi platform yang efektif untuk menggalang dukungan publik dan menyebarkan informasi tentang mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman lebih lanjut, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, perlu adanya peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak anak dan kekerasan seksual di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas. Materi tentang perlindungan anak harus

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta. 2007) Hlm. 17

¹³ Satya Aruna Soedirjo. *Perlindungan Hukum Anak*. (PT. Alumni. Yogyakarta, 2008) Hlm.56

dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agar anak-anak sejak dini memahami hak-hak mereka dan tahu bagaimana cara melaporkan jika terjadi kekerasan. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Layanan seperti P2TP2A perlu diperluas dan dipermudah aksesnya, terutama di daerah-daerah terpencil. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas pelayanan juga harus ditingkatkan agar mereka lebih peka dan terampil dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketiga, pemerintah dan NGO harus terus melakukan kampanye kesadaran publik secara berkelanjutan. Kampanye ini harus menasar berbagai lapisan masyarakat dan menggunakan berbagai media untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pesan-pesan kampanye harus menekankan pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana cara melaporkan dan layanan apa saja yang tersedia untuk membantu korban. Keempat, perlu adanya perubahan budaya dan norma sosial yang mendukung pelaporan kekerasan seksual. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan kampanye yang mengedepankan pentingnya menghargai hak-hak anak dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas sangat penting dalam mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual dan melaporkan kasus tersebut. Kelima, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang melindungi anak dari kekerasan seksual dan memastikan pelaksanaannya. Undang-undang yang ada harus ditegakkan dengan tegas dan pelaku kekerasan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini akan memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak akan ditoleransi.

Jadi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini melibatkan pendidikan, kampanye publik, peningkatan layanan, perubahan budaya, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan upaya bersama dari pemerintah, NGO, media, dan masyarakat luas, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat lebih banyak terungkap dan ditangani dengan baik, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

3. *Peran dan Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak di Indonesia*

a. *Peran Aparat Penegak Hukum*

1. *Penegakan Hukum*

Aparat penegak hukum memegang peran vital dalam penyidikan dan penyelidikan kasus kekerasan seksual anak. Mereka harus bekerja secara profesional, sensitif, dan dengan perspektif yang berfokus pada anak. Penyidikan yang baik harus mencakup pengumpulan bukti yang kuat, wawancara dengan saksi dan korban dengan cara yang tidak menimbulkan trauma tambahan, serta analisis forensik yang mendalam. Semua ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, mengingat anak-anak adalah kelompok yang rentan.

Penangkapan dan penahanan pelaku kekerasan seksual anak harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum harus

memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Penahanan harus mempertimbangkan aspek keamanan korban dan potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku jika tidak segera ditahan.¹⁴ Dalam proses pengadilan, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, harus memastikan bahwa perkara diproses dengan adil. Hakim harus memutuskan berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban. Hal ini termasuk menjaga agar proses persidangan tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban anak-anak. Sesuai pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang relevan dengan kekerasan seksual terhadap anak :

- a) Pasal 287 KUHP berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan anak di bawah umur 15 tahun, dihukum penjara maksimal 9 tahun”.
- b) Pasal 288 KUHP berbunyi “Hubungan seksual dengan anak di bawah umur dalam ikatan perkawinan, hukuman penjara maksimal 4 tahun (7 tahun jika salah satu pihak sudah menikah)”.
- c) Pasal 290 KUHP berbunyi “Perbuatan cabul dengan anak di bawah umur, dihukum penjara maksimal 5 tahun”.

Eksekusi putusan pengadilan harus dilaksanakan dengan tegas dan konsisten. Pelaku kekerasan seksual anak harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pelaksanaan hukuman ini juga harus diawasi untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi, dan hak-hak korban dipenuhi.

2. Pencegahan

Sosialisasi dan Edukasi, Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual anak. Program-program edukasi ini harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang tua, hingga tenaga pendidik. Edukasi dapat berupa seminar, workshop, kampanye media sosial, dan penyebaran materi informasi yang mudah dipahami. Pencegahan kekerasan seksual anak memerlukan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait. Lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah lainnya harus berkolaborasi untuk membangun sistem pencegahan yang komprehensif.¹⁵ Contohnya, aparat penegak hukum bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan materi pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan.

Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak sangat penting. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan harus diberikan kepada polisi, jaksa, dan hakim agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang penanganan kasus ini. Pelatihan harus mencakup aspek-aspek hukum, psikologi anak, dan teknik interogasi yang sensitif terhadap korban.

3. Perlindungan Korban

Korban kekerasan seksual anak harus mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis yang memadai. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa korban

¹⁴ Amalia, R., & Sari, R. A. (2021). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Di Kota Padang. *Jurnal Magister Hukum*

¹⁵ Agus S, I Putu. “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (INCEST)”. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

berada dalam lingkungan yang aman dan jauh dari ancaman pelaku. Selain itu, dukungan psikologis sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami. Korban kekerasan seksual anak memerlukan akses ke layanan kesehatan, rehabilitasi, dan psikososial. Aparat penegak hukum harus memfasilitasi akses ini, termasuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan konseling psikologis yang berkelanjutan. Layanan rehabilitasi juga harus mencakup program-program yang membantu korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Membantu korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial adalah bagian penting dari perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Ini termasuk memastikan bahwa korban dapat kembali ke lingkungan sosial dan pendidikan tanpa stigma atau diskriminasi.¹⁶ Program-program dukungan sosial dan bimbingan harus disediakan untuk membantu korban mengembalikan kepercayaan diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan perlu dioptimalkan. Berikut beberapa indikator yang menunjukkan tantangan tersebut:

1. Tingginya Angka Kasus Kekerasan Seksual Anak

Data dari Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 14.596 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Angka ini sangat tinggi dan menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tingginya angka ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, serta masih adanya budaya diam di masyarakat.

2. Lambatnya Proses Penyelesaian Kasus

Banyak kasus kekerasan seksual anak yang mandek di tingkat penyidikan dan penyelidikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Proses yang lambat ini seringkali membuat korban merasa putus asa dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

3. Rendahnya Tingkat Penjatuhan Hukuman

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual anak seringkali tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Banyak pelaku yang mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas dari hukuman karena berbagai alasan, termasuk kurangnya bukti yang kuat atau proses hukum yang tidak berjalan dengan baik.¹⁷ Hal ini menyebabkan efek jera yang minim dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

4. Kurangnya Sensitivitas dan Perspektif Anak

Aparat penegak hukum seringkali kurang sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi korban kekerasan seksual anak. Misalnya, proses interogasi yang tidak dilakukan dengan baik bisa menyebabkan trauma tambahan bagi korban.

¹⁶ Yusnita, E. (2021). PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR. Jurnal Janaloka

¹⁷ Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak di Dalam Keluarga. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

Kurangnya pemahaman tentang perspektif anak dalam penanganan kasus juga menghambat proses pemulihan dan membuat korban merasa tidak didukung.

b. Upaya Peningkatan Kinerja Aparat Penegak Hukum

Untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak, perlu dilakukan beberapa upaya berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur aparat penegak hukum. Ini termasuk menyediakan pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus kekerasan seksual anak. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga harus disediakan untuk mendukung proses penyidikan, penyelidikan, dan persidangan.

2. Penguatan Koordinasi Antar Instansi

Penguatan koordinasi antar instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak, sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa penanganan kasus berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien.¹⁸ Selain itu, koordinasi yang baik juga akan mempercepat proses penyelesaian kasus dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan.

3. Pengembangan Standar Operasi Prosedur (SOP)

Pengembangan SOP yang jelas dan terstandarisasi untuk penanganan kasus kekerasan seksual anak sangat penting. SOP ini harus memuat panduan tentang cara penyidikan, penyelidikan, persidangan, dan perlindungan korban yang sensitif dan berperspektif anak. SOP yang baik akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

4. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual anak sangat penting. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual dan mendorong mereka untuk melaporkan kasus yang terjadi adalah langkah kunci dalam pencegahan kekerasan seksual anak. Kampanye edukasi dan sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus dan menjangkau berbagai lapisan Masyarakat.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru secara bersama-sama memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual pada anak. UU TPKS memberikan fokus pada perlindungan dan pemulihan korban, sedangkan KUHP Baru memberikan fokus pada penjeratan pelaku. Kedua regulasi ini diharapkan dapat mendorong pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang lebih

¹⁸ Fitriani, F. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak). *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(1)

efektif. Faktor Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Indonesia. Namun, kinerja aparat penegak hukum masih perlu dioptimalkan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain tingginya angka kasus kekerasan seksual anak, lambatnya proses penyelesaian kasus, rendahnya tingkat penjatuhan hukuman, dan kurangnya sensitivitas dan perspektif anak dalam penanganan kasus.

SARAN

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur, penguatan koordinasi antar instansi, pengembangan SOP yang jelas dan terstandarisasi, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Indonesia dapat meningkat, sehingga memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang telah mendanai penelitian ini dan memberikan support yang luar biasa serta ucapan terimakasih kami sampaikan kepada tim peneliti dan tim yang terlibat dalam memeberikan sumbangsi kelengkapan data penelitian ini dan tidak lupa ucapan terimakasih juga kami sampikan kepada Fakultas Hukum Universitas Kuniangan yang mengempelentasikan program kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah kedua Lembaga dan dukungannya yang luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus S, I Putu. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (INCEST)". 9. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Agustini, Ika dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechtenstudent Journal*, No 2 Vol 3 (Desember 2021): 343.
- Alfiani, Vivi Riski. "UU TPKS vs KUHP: Perbedaan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 8, No. 2 (2022), 271-290.
- Alimuddin, Penyelesaian sengketa PKDRT di Pengadilan Agama, Mandar Maju Cet Ke-1. Bandung, 2014
- Amalia, R., & Sari, R. A. (2021). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Di Kota Padang. *Jurnal Magister Hukum*, 33(1), 1-20. <https://law.ugm.ac.id/jurnal/>
- Angga Saputra, "Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2022): 135-148.
- Annisa, T., Fathul, L. N.** "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual". *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, Volume 11, Nomor 1, Mei, 2020.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Eddy, O.S Hiariej. *Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga, 2022.

- Fitriani, F. (2020). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak). *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(1), 90-111.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak di Dalam Keluarga*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Pualillin, Azriel. "Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum." *Mandar: Social Science Journal* 1, no. 2 (2022): 86-99.
- Silaen Chrisman Reynold S. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. 7 September 2023,
- Sarip Hidayat. *Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol. 13 Nomor 02.2022. 181-191
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Rineka Cipta. 2007
- Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila," *Osf.Io*, no. August (2018): 1-20.
- Yusnita, E. (2021). *Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. *Jurnal Janaloka*, 6(2), 27-40.